

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
SUB UNIT KERJA : KOMISIONER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HASYIM ASY'ARI**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **535304**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

5.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 357 m2/357 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/700 m2 di KUDUS, WARISAN Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
5. Tanah Seluas 1054 m2 di KUDUS, WARISAN Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 700 m2 di REMBANG, WARISAN Rp. 600.000.000
7. Tanah Seluas 170 m2 di REMBANG, WARISAN Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 190 m2 di REMBANG, WARISAN Rp. 100.000.000
9. Tanah Seluas 190 m2 di REMBANG, WARISAN Rp. 100.000.000
10. Tanah Seluas 250 m2 di REMBANG, WARISAN Rp. 600.000.000
11. Tanah Seluas 5600 m2 di PATI, WARISAN Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

410.000.000

1. MOTOR, VESPA PX150 Tahun 1985, WARISAN Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SPEICE Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, TOYOTA PRADO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOBIL, NISSAN NEW SERENA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.



200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	740.000.000
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.263.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.013.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.013.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Mei 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.